

Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran **PENDIDIKAN** Melalui APBN



**Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Tinjauan Kritis Atas
Pengelolaan Anggaran
Pendidikan Melalui APBN**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2019**

Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui APBN

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis

Adhi Prasetyo, S.M.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Fransina Natalia Mahudin, S.E.

Martha Carolina, SE.,Ak., M.Ak.

Ollani Vabiola Br.Bangun, M.M.

Rahayuningsih, S.Pd.

Ricka Wardianingsih, S.E.

Robby Alexander Sirait, M.E.

Savitri Wulandari, S.E.

Taufiq Hidayatullah, S.E.

Penyunting

Robby Alexander Sirait, M.E.

Desain Sampul

Slamet Widodo, S.E.,M.E

Cetakan Pertama, Juni 2019

ISBN : 978 - 602 - 50563 - 8 - 3

Diterbitkan oleh

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PENGANTAR

KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui APBN ini dapat diterbitkan.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) dinyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengaturan ini merupakan hasil amandemen keempat UUD NRI pada tahun 2002, yang mengisyaratkan bahwa para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara kolektif menyadari bahwa pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Salah satu penentu keberhasilan pembangunan nasional adalah tersedianya manusia-manusia Indonesia yang berkualitas, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN sebagaimana dimanahkan oleh konstitusi. Anggaran pendidikan tersebut dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, transfer ke

daerah dan dana desa , dan pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan dan semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

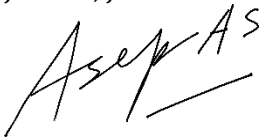
Dalam kurun waktu 2009-2019, nilai anggaran pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan secara kumulatif telah mencapai Rp3.920,45 triliun. Jika dikelola dengan tepat dan optimal, besarnya anggaran pendidikan dalam satu dekade terakhir ini seharusnya berimplikasi positif terhadap perbaikan capaian-capaian indikator pendidikan nasional. Artinya, dampak kenaikan anggaran pendidikan terhadap indikator-indikator pendidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan setiap program bidang pendidikan yang dikerjakan oleh Pemerintah.

Berangkat dari pemikiran tersebutlah, buku ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mencoba menyajikan tinjauan kritis atas pengelolaan beberapa program bidang pendidikan yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendidikan melalui APBN. Tinjauan kritis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan, agar benar-benar efektif, efisien dan optimal mendorong perbaikan kualitas manusia Indonesia di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran pendidikan di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan

di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Juni 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of the name 'Asep' followed by the initials 'AS' in a stylized, cursive script.

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Daftar Isi

Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI	iii
Daftar Isi	vii
BAB I WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA PASKA ALOKASI ANGGARAN 20 PERSEN UNTUK PENDIDIKAN	1
Olanie Vabiola Bangun, SIP.,M.M., Robby Alexander Sirait, M.E.	
BAB II EFEKTIVITAS PROGRAM INDONESIA PINTAR	20
Rahayuningsih, S.Pd., Robby Alexander Sirait, M.E.	
BAB III CATATAN KRITIS PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL (ENDOWMENT FUND)	31
Ricka Wardianingsih, S.E., Robby Alexander Sirait, M.E.	
BAB IV TINJAUAN KRITIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)	45
Dahiri, S.Si., M.Sc., Ricka Wardianingsih, S.E.	
BAB V MENILIK PENDIDIKAN VOKASI	58
Adhi Prasetyo S.M., Taufiq Hidayatullah, S.E.	
BAB VI POTRET 8 TAHUN PROGRAM BIDIKMISI	70
Adhi Prasetyo S.M., Taufiq Hidayatullah, S.E.	
BAB VII CATATAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM TUNJANGAN PROFESI GURU	83
Adhi Prasetyo S.M., Rahayuningsih, S.Pd.	
BAB VIII EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	97
Ollani Vabiola Bangun S.IP.,M.M., Martha Carolina. SE.,Ak.M.Ak	
BAB IX TINJAUAN KRITIS AKREDITASI SEKOLAH	117
Dahiri, S.Si., M.Sc., Fransina Natalia Mahudin, S.E., Savitri Wulandari, S.E.	

BAB X	DANA ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN & TANTANGAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI INDONESIA	131
	Fransina Natalia Mahudin.,S.E., Martha Carolina, SE.,Ak, M.Ak., Savitri Wulandari, S.E.	

ISBN 978-602-50563-8-3



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id